

## Manajemen Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan (Studi Komparasi di SMPN 14 Mataram dan SMP Dwi Jendra Mataram)

Zikrul Hamdani<sup>(1)</sup>, S. Ali Jadid Al Idrus<sup>(2)</sup>, Subki<sup>(3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Mataram, Indonesia

Email: <sup>1</sup> [dany.pnpm@gmail.com](mailto:dany.pnpm@gmail.com), <sup>2</sup> [s.alijadid78@uinmataram.ac.id](mailto:s.alijadid78@uinmataram.ac.id),  
<sup>3</sup> [subki@uinmataram.co.id](mailto:subki@uinmataram.co.id)

**Abstrak:** Indonesia adalah negara dengan keragaman luar biasa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, etnik, agama, dan budaya, namun saat ini menghadapi tantangan intoleransi yang meningkat, termasuk di lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami manajemen moderasi beragama di SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra Mataram, menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sekolah memiliki strategi yang berbeda namun sejalan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan moderasi beragama. SMPN 14 Mataram menerapkan nilai-nilai moderasi melalui kurikulum yang inklusif, sementara SMPS Dwijendra Mataram menekankan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program. Evaluasi di kedua sekolah menunjukkan bahwa moderasi beragama telah terintegrasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik, membantu menciptakan lingkungan yang toleran dan harmonis. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan gambaran tentang pentingnya moderasi beragama di sekolah untuk membentuk siswa yang toleran dan menghargai perbedaan.

---

### Tersedia Online di

[http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset\\_Konseptual](http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual)

---

### Sejarah Artikel

Diterima pada : 01-07-2024

Disetujui pada : 10-07-2024

Dipublikasikan pada : 22-07-2024

---

### Kata Kunci:

Manajemen Sekolah, Moderasi Beragama, Lembaga Pendidikan,

---

### DOI:

[http://doi.org/10.28926/riset\\_konseptual.v8i3.1005](http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v8i3.1005)

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keragaman, terdiri dari 1.340 suku (NasuXon, 2019), 700 bahasa daerah (Wijanarka & Sari, 2023), 300 etnik (Safitri dkk., 2023), dan 6 agama besar, serta berbagai budaya yang berbeda (Melasari dkk., 2021). Keragaman ini memerlukan toleransi dalam pengelolaannya, termasuk di lembaga pendidikan yang memiliki budaya dan kultur berbeda-beda. Namun, akhir-akhir ini keragaman Indonesia sedang diuji dengan adanya tindakan keberagamaan yang berlebihan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama (Shaleh & Fadhilah, 2022). Fenomena serupa juga terjadi di dunia, di mana ada kelompok masyarakat yang bersikap eksklusif, eksplosif, dan intoleran dengan menjadikan agama sebagai pembenar.

Menurut data, pada tahun 2019 Imparsial mencatat 31 kasus intoleransi yang mayoritas berupa pelanggaran ibadah (Matius Alfons, 2019), sementara Setara Institute mencatat 50 kasus intoleransi pada tahun 2022, sebagian besar terjadi di rumah ibadah (Wardah, 2023). Kasus intoleransi juga terjadi di lembaga pendidikan, seperti pelanggaran penggunaan jilbab di SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 Denpasar pada tahun 2014 (Dian Ihsan, 2021), serta surat edaran yang mewajibkan pakaian muslim di SDN 3 Karang Tengah, Yogyakarta, pada tahun 2019 (Pertana, 2019). Kasus lain terjadi di SMAN 8 Yogyakarta, di mana kepala sekolah mewajibkan siswa mengikuti kemah di Hari Paskah, dan pada awal tahun 2020 (Dian Ihsan, 2021), seorang siswa Rohis SMA 1 Gemolong Sragen merundung siswi lain karena tidak berhijab. (Duhri, 2020)

Berbagai permasalahan intoleransi di sekolah tersebut sangat memprihatinkan, terutama karena terjadi di sekolah negeri yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk menimba ilmu. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Beribadah dan melaksanakan ibadah merupakan hak yang dijamin oleh UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Setiap Warga Negara dan UUD 1945 Pasal 28E yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Menghadapi tindakan intoleransi tersebut, penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan menjadi sangat penting (Hanani & Nelmaya, 2020). Moderasi beragama berarti memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang seimbang dan berkeadilan (Harahap, 2024). Hal ini perlu diajarkan sejak dini agar siswa tidak berperilaku ekstrem dalam mengimplementasikan ajaran agamanya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, tetapi menekankan pada prinsip moderasi yang ada dalam agama itu sendiri, yaitu keadilan dan keseimbangan. (Elvinaro & Syarif, 2022)

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, moderasi beragama dapat digunakan sebagai strategi kebudayaan untuk menjaga kedamaian dan toleransi (Irama & Zamzami, 2021, hlm. 2019–2020). Diharapkan dengan penguatan moderasi beragama, pemeluk agama dapat memosisikan diri dengan tepat dalam masyarakat multireligius sehingga tercipta harmonisasi sosial. Tercapainya tujuan moderasi beragama akan terlihat dari beberapa indikator, seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan tradisi serta budaya lokal dalam perilaku keagamaan. Penelitian tentang manajemen moderasi beragama di SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra Mataram penting untuk dilakukan guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang pengelolaan moderasi beragama di sekolah-sekolah tersebut.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan melalui deskripsi kata-kata. Penelitian ini berlandaskan filsafat popositivisme dan dilakukan dalam konteks natural, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian yang dipilih adalah studi komparasi untuk membandingkan dua objek, yaitu SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra Mataram, berdasarkan keberagaman latar belakang siswa dan lingkungan sekolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, survei, dan observasi, serta data sekunder dari dokumen sekolah. Penelitian dilakukan di SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra Mataram, lokasi yang dipilih karena keragaman siswa dan latar belakang sekolah yang berbeda. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara bebas terpimpin, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah reduksi data, *display* data, dan verifikasi untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian.

## HASIL dan PEMBAHASAN

### **Moderasi Beragama di SMPN 14 Mataram dan SMP Dwijendra Mataram Perencanaan Moderasi Beragama di SMPN 14 Mataram**

Hasil wawancara dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa SMPN 14 Mataram melakukan perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, khususnya terkait moderasi beragama. Perencanaan ini bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan dalam pembuatan kebijakan agar dapat dilaksanakan secara optimal. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, sekolah mengadakan rapat untuk menyusun rencana moderasi beragama. Langkah awal melibatkan komunikasi pentingnya moderasi beragama di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum menekankan bahwa tahapan perencanaan ini sangat penting untuk menjalankan program secara matang. (Hj. Lina Yetti Budi Asih, 2024)

Perencanaan tahapan kebijakan sekolah melibatkan semua unsur sekolah melalui rapat di awal tahun ajaran. Rapat ini dipimpin oleh kepala sekolah dan mencakup wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kebijakan yang akan dijalankan, terutama yang terkait dengan moderasi beragama. Dalam forum ini, nilai-nilai moderasi seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, keberagaman, dan keteladanan diformulasikan untuk implementasi. Setelah menetapkan kebijakan, sosialisasi lebih lanjut dilakukan melalui rapat tahunan dan rapat khusus agar kebijakan bisa dilaksanakan dengan efektif. (Kadir, 2024b)

Dalam proses perencanaan, kepala sekolah mengaitkan program-program dengan kebijakan pemerintah seperti kurikulum merdeka yang relevan dengan nilai moderasi beragama (Hj. Lina Yetti Budi Asih, 2024). Rapat perencanaan menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi di antara staf sekolah untuk memastikan kebijakan terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan wawancara, tujuan kebijakan ini adalah untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia, moderat, berimbang, saling menghargai, tidak ekstrem, serta kompeten dan kompetitif dalam era global. Visi sekolah ini sangat selaras dengan konsep moderasi beragama dan bertujuan mencetak peserta didik yang berilmu, berakhlak, dan berprestasi. (Agustini, 2024)

### **Implementasi Moderasi Beragama di SMPN 14 Mataram**

Penelitian menunjukkan bahwa SMPN 14 Mataram menerapkan moderasi beragama dengan melibatkan seluruh warga sekolah, khususnya para guru sebagai pendidik utama (Fathurrahman, 2024). Guru-guru berperan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi (*tasammuh*) kepada siswa melalui pembelajaran yang menghargai berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda. Dalam prosesnya, guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga memberikan contoh (*uswah*) melalui tindakan sehari-hari, membimbing, dan mendampingi siswa untuk mengembangkan karakter yang moderat. (Kadir, 2024a)

Sekolah sebagai lembaga pendidikan, di bawah pimpinan kepala sekolah, menerapkan kebijakan yang adil (*i'tidal*) bagi semua siswa tanpa membedakan agama. Ini termasuk memberikan kesempatan yang sama dalam memilih program sekolah dan tidak membeda-bedakan siswa ketika memilih duta sekolah. Selain itu, sekolah menjamin kesetaraan (*tawazun*) dalam menjalankan ritual keagamaan bagi siswa Muslim, Hindu, dan Kristen. Kegiatan seperti menghormati puasa Ramadhan dan saling berkunjung saat Idul Fitri menunjukkan praktik nyata moderasi beragama di sekolah ini, di mana siswa dari berbagai agama saling menghormati dan mendukung satu sama lain. (Kadir, 2024a)

Penerapan nilai moderasi beragama di SMPN 14 Mataram juga tercermin dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Nilai-nilai ini dimasukkan dalam kurikulum, terutama dalam pelajaran agama dan PPKN, yang mengajarkan toleransi dan saling menghormati (Agustini, 2024). Dalam kegiatan non-akademik, seperti literasi religius dan kegiatan IMTAQ, siswa diberikan kesempatan untuk membaca kitab suci dan mengikuti pembinaan spiritual tanpa membedakan agama. Selain itu, ekstrakurikuler dan penyuluhan yang bekerja sama dengan berbagai instansi juga mendukung penanaman nilai-nilai moderasi, mendorong kehidupan rukun, dan menghindari perilaku menyimpang. (Hj. Lina Yetti Budi Asih, 2024)

### **Evaluasi Pelaksanaan Moderasi Beragama di SMPN 14 Mataram**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diketahui bahwa evaluasi penerapan kebijakan moderasi beragama di SMPN 14 Mataram dilakukan melalui evaluasi program sekolah dan kesiswaan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur apakah penanaman nilai-nilai moderasi beragama telah terintegrasi dalam mata pelajaran yang diajarkan. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Merdeka

Belajar dengan Enam Dimensi Profil Pelajar Pancasila, yang juga dievaluasi keefektifannya dalam mendukung moderasi beragama (Hj. Lina Yetti Budi Asih, 2024).

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menambahkan bahwa evaluasi kebijakan sekolah dilakukan melalui evaluasi kurikulum dan kegiatan kesiswaan. Kebijakan sekolah yang mengadopsi Kurikulum Merdeka Belajar memiliki sasaran yang dikenal sebagai Enam Dimensi Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup nilai-nilai moderasi beragama seperti tawasuth (jalan tengah), tawazun (berimbang), ta'adul (berkeadilan), dan tasamuh (toleran). Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kurikulum tersebut efektif dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa. (Kadir, 2024b)

Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan menjelaskan bahwa evaluasi juga dilakukan terhadap kebijakan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Kebijakan kesiswaan terkait moderasi beragama mencakup kolaborasi antara guru agama Muslim dan non-Muslim dalam kegiatan keagamaan. Evaluasi ini menilai efektivitas kerja sama tersebut dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru agama Hindu menguatkan bahwa evaluasi ini merupakan penilaian terhadap ketercapaian kebijakan yang diterapkan, terutama dalam pembelajaran PAI yang mengajarkan toleransi, penghargaan, keadilan, dan musyawarah. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan pelaksanaan kebijakan moderasi beragama di SMPN 14 Mataram, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. (Agustini, 2024)

### **Perencanaan Moderasi Beragama di SMPS Dwijendra Mataram**

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMPS Dwijendra Mataram menunjukkan bahwa sekolah melakukan perencanaan tahapan setiap program kerja yang akan dilaksanakan. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, perencanaan pembelajaran dan berbagai kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan moderasi beragama, disusun sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang menunjang kegiatan pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Dengan demikian, perencanaan implementasi moderasi beragama menjadi bagian integral dari program tahunan sekolah. (Yoga, 2024)

Penyusunan rencana moderasi beragama dilakukan melalui rapat sekolah sebelum tahun ajaran baru berjalan. Perencanaan ini dirancang agar program pembelajaran dapat berjalan lancar dan menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan sekolah. Perencanaan pelaksanaan moderasi beragama merupakan bagian dari program tahunan sekolah. Guru yang membidangi kurikulum menyatakan bahwa tahapan perencanaan ini melibatkan rapat awal tahun ajaran yang dipimpin oleh kepala sekolah dan melibatkan seluruh unsur sekolah seperti wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan yang akan dijalankan. (Tien, 2024)

Guru yang membidangi kesiswaan menegaskan bahwa perencanaan tahapan kebijakan sekolah sangat penting untuk memastikan kebijakan dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika. Perencanaan ini dimulai dengan rapat manajemen sekolah untuk menetapkan program atau kebijakan yang akan diterapkan, termasuk moderasi beragama. Kepala sekolah mengemukakan bahwa program-program yang dijalankan harus sesuai dengan kebijakan pemerintah. Upaya yang harus dilakukan agar kebijakan terlaksana dengan baik dijelaskan dalam rapat melalui sinergi dan koordinasi antar staf sekolah. Tahapan perencanaan kebijakan sekolah terkait moderasi beragama meliputi perencanaan komunikasi, formulasi, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, moderat, berimbang, saling menghargai, dan kompetitif di era global, sesuai dengan visi sekolah. (Tien, 2024)

### **Pelaksanaan Moderasi Beragama di SMP Dwijendra Mataram**

Hasil wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan program sekolah, kepala sekolah mengkomunikasikan berbagai program yang akan dilaksanakan dengan seluruh wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Komunikasi ini mencakup program yang sudah berjalan maupun program baru yang diamanatkan oleh pemerintah, seperti kebijakan merdeka belajar, sekolah penggerak, dan moderasi beragama. Khusus untuk moderasi beragama, kepala sekolah berkoordinasi dengan wakil kepala kurikulum, wakil kepala kesiswaan, dan guru mata pelajaran terkait. (Yoga, 2024)

Guru kurikulum menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan sekolah, termasuk penanaman nilai moderasi beragama, dilakukan melalui langkah komunikasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap komunikasi, kepala sekolah mendiskusikan rencana dengan wakil kepala kurikulum, kesiswaan, dan guru mata pelajaran untuk memastikan kesamaan persepsi sesuai dengan Permendikbud No. 22 tahun 2020 dan KMA No. 183 dan No. 184 tentang implementasi moderasi beragama di sekolah. Komunikasi dan koordinasi ini penting agar semua unsur sekolah memahami dan siap melaksanakan program. (Tien, 2024; Widiatuti, 2024)

Wakil kepala kesiswaan menambahkan bahwa komunikasi kepala sekolah dengan unsur terkait sangat penting untuk menyamakan pandangan dalam pelaksanaan program (Muryatini, 2024). Hasil wawancara dengan guru agama Hindu mendukung bahwa rapat sekolah membahas program dan kebijakan baru pemerintah terkait pendidikan, termasuk moderasi beragama. Pelaksanaan kebijakan moderasi beragama dilakukan melalui kebijakan kurikulum dan kesiswaan, di mana nilai-nilai moderasi beragama diintegrasikan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini juga tercermin dalam visi dan misi sekolah yang menekankan pentingnya toleransi, kebersamaan, dan penghargaan terhadap keberagaman. (Astrina, 2024)

### **Evaluasi Pelaksanaan Moderasi Beragama di SMP Dwijendra Mataram**

Hasil wawancara dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa evaluasi penerapan kebijakan sekolah dalam menanamkan nilai moderasi beragama dilakukan melalui evaluasi program sekolah dan kesiswaan. Evaluasi program sekolah bertujuan untuk mengukur apakah nilai-nilai moderasi beragama sudah terintegrasi dalam mata pelajaran yang diajarkan. Sekolah ini telah menggunakan kurikulum merdeka belajar yang mencakup enam dimensi profil pelajar Pancasila. Evaluasi ini juga mencakup keefektifan penerapan kurikulum merdeka belajar dan kegiatan moderasi beragama. (Yoga, 2024)

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum mengkonfirmasi bahwa evaluasi dilakukan melalui peninjauan kurikulum dan kegiatan kesiswaan. Kurikulum merdeka belajar, dengan enam dimensi profil pelajar Pancasila, mengandung nilai-nilai moderasi beragama seperti tawasuth (jalan tengah), tawazun (keseimbangan), ta'adul (keadilan), tasamuh (toleransi), dan tasyawur (musyawarah). Nilai-nilai ini sejalan dengan kebijakan sekolah untuk menanamkan toleransi. Evaluasi bertujuan menilai seberapa baik kurikulum merdeka belajar diimplementasikan dengan fokus pada nilai-nilai moderasi beragama. (Tien, 2024)

Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan menambahkan bahwa evaluasi juga mencakup kebijakan pembelajaran di dalam dan luar kelas. Kebijakan ini mendorong kolaborasi antara guru agama muslim dan non-muslim dalam kegiatan keagamaan, untuk menilai efektivitas kerjasama dalam menanamkan nilai moderasi beragama kepada siswa. Guru agama Hindu menguatkan bahwa evaluasi mencakup penilaian oleh pimpinan dan manajemen sekolah terhadap kebijakan yang diterapkan, khususnya melalui mata pelajaran agama Hindu yang mengajarkan toleransi, saling menghargai, keadilan, dan musyawarah. Berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara, evaluasi ini mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan moderasi beragama dalam kegiatan akademik dan non-akademik. (Muryatini, 2024)

## Persamaan dan Perbedaan Implementasi Moderasi Beragama di SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra Mataram

Moderasi keberagamaan siswa di SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra Mataram, sebagai lembaga pendidikan menengah pertama, memiliki karakteristik unik masing-masing. Keduanya menunjukkan perbedaan dan persamaan dalam berbagai aspek, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berikut ini adalah penjabaran dari perbedaan dan persamaan tersebut oleh peneliti.

### Perencanaan

Implementasi moderasi beragama di SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra 14 Mataram menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam aspek perencanaan. Kedua lembaga ini menggunakan perencanaan sebagai sumber acuan normatif dalam memahami pluralitas keberagamaan dalam konteks moderasi beragama. SMPN 14 Mataram, misalnya, menggabungkan nilai-nilai agama sebagai landasan penyusunan visi dan misi sekolah, yang menekankan nilai-nilai seperti *tawasuth*, *tawazun*, *ta'adul*, keadilan, dan toleransi sebagai bagian integral dari visi dan misi tersebut. Nilai-nilai keagamaan ini menjadi pondasi utama bagi institusi pendidikan dalam membentuk karakter siswa dan menetapkan kegiatan pembelajaran, pengembangan ekstrakurikuler, pengalaman keagamaan, serta budaya belajar yang diharapkan.

SMPN 14 Mataram mengintegrasikan visi dan misi sekolah ke dalam setiap aspek pembelajaran, menunjukkan urgensi moderasi beragama dalam suasana belajar yang plural. SMPS Dwijendra Mataram, di sisi lain, menegaskan moderasi keberagamaan siswa melalui visi dan misi yang berorientasi pada kualitas, prestasi, dan budaya lingkungan sekolah yang kondusif. Melalui visi dan misi ini, lembaga ini menggarisbawahi pentingnya mengembangkan program-program inovatif untuk membangun karakter siswa yang siap menghadapi tantangan global.

Meskipun keduanya memiliki fokus pada moderasi beragama, perbedaan muncul dalam kewenangan pengelolaan. SMPN 14 Mataram, sebagai lembaga pemerintah, mengikuti kebijakan pemerintah dalam perencanaan kegiatan pembelajaran, sementara SMPS Dwijendra Mataram, yang dikelola oleh yayasan, juga harus mempertimbangkan kebijakan yayasan dalam operasionalnya. Kedua lembaga tersebut juga memiliki perbedaan dalam sumber normatif agama yang digunakan dalam moderasi keberagamaan siswa. SMPS Dwijendra Mataram, dengan mayoritas siswa beragama Hindu, lebih didasarkan pada norma-norma agama Hindu dalam implementasi moderasi beragama, sedangkan SMPN 14 Mataram mengadopsi norma-norma lintas agama, dengan keberagaman agama yang tinggi di antara siswanya.

### Pelaksanaan

Implementasi moderasi beragama di SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra 14 Mataram menunjukkan perbedaan dan persamaan dalam hal pelaksanaan. Perbedaan struktural terlihat dalam penerapan mata pelajaran agama yang berbeda di kedua lembaga. SMPN 14 Mataram menggunakan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pelajaran Agama Hindu sebagai dasar struktur moderasi beragama siswa, sedangkan SMPS Dwijendra Mataram hanya mengajarkan pendidikan agama Hindu dan Kristen karena mayoritas siswanya adalah penganut Hindu.

Pendidikan agama, menurut M. Ikhwan, penting dalam membentuk sikap keagamaan dan mencegah radikalisme, dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan kesetaraan, cinta kasih, dan kedamaian. Selain Islam, agama lain juga mengajarkan nilai-nilai damai, seperti Kristen dengan konsep Shalom dan Katolik dengan sepuluh perintah Tuhan. Implementasi moderasi beragama di kedua sekolah melibatkan kurikulum, pembelajaran, ekstrakurikuler, dan pembiasaan nilai positif. (Ikhwan dkk., 2023)

Kedua sekolah menerapkan moderasi beragama melalui kurikulum dan pembelajaran dengan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi seperti toleransi dan

saling menghormati. Perbedaan terletak pada mata pelajaran agama yang diajarkan: SMPN 14 Mataram mengajarkan PAI, Agama Hindu, dan Kristen, sedangkan SMPS Dwijendra Mataram hanya mengajarkan agama Hindu dan Kristen.

Selain itu, keduanya menggunakan ekstrakurikuler sebagai sarana untuk menginternalisasi moderasi beragama. Namun, SMPN 14 Mataram menawarkan lebih banyak pilihan ekstrakurikuler daripada SMPS Dwijendra Mataram, yang hanya menawarkan kegiatan pramuka. Pembiasaan nilai positif, seperti salam, membaca doa, dan disiplin, juga dilakukan di kedua sekolah. Kegiatan rutin hari besar keagamaan juga menjadi bagian dari implementasi moderasi beragama, menunjukkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama.

Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam implementasi moderasi beragama antara SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra Mataram, keduanya memiliki kesamaan dalam upaya untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan mendorong sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama di kalangan siswa.

### **Evaluasi**

Evaluasi moderasi keberagamaan di SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra Mataram menunjukkan perbedaan dan kesamaan dalam proses penilaian dan perbaikan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama telah terintegrasi ke dalam program sekolah dan kegiatan kesiswaan. Hal ini mencakup penilaian terhadap penerapan nilai-nilai tersebut dalam mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler serta kepatuhan terhadap kurikulum merdeka belajar yang berhubungan dengan moderasi beragama.

Evaluasi program merupakan upaya sistematis untuk mengevaluasi perencanaan, tujuan, manfaat, efektivitas, dan kesesuaian suatu program dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi guna pengambilan keputusan yang tepat terkait kelanjutan atau perubahan program. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi juga pada analisis menyeluruh terhadap capaian program serta dampaknya.

Dalam kedua sekolah, evaluasi implementasi moderasi beragama dilakukan dengan menetapkan indikator pencapaian yang diharapkan dari program tersebut. Ini melibatkan identifikasi perubahan yang terjadi setelah program diterapkan, dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan kesesuaian program. Kesimpulannya, proses evaluasi di SMPN 14 Mataram dan SMPS Dwijendra Mataram dilakukan secara serupa dengan fokus pada penilaian kesesuaian program dengan nilai-nilai moderasi beragama yang diusung.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa baik SMPN 14 Mataram maupun SMP Dwijendra Mataram menerapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi moderasi beragama dengan pendekatan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang toleran dan menghargai keberagaman. SMPN 14 Mataram mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam visi dan misi sekolah, kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen sekolah. SMPS Dwijendra Mataram, di sisi lain, menekankan moderasi beragama melalui visi misi yang berorientasi pada kualitas dan prestasi siswa serta menerapkan norma agama Hindu dan Kristen dalam kegiatan pembelajarannya.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan rinci tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi moderasi beragama di kedua sekolah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam konteks yang berbeda, dengan mempertimbangkan perbedaan struktural dan normatif antar sekolah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan sekolah

dalam memastikan kebijakan moderasi beragama dilaksanakan dengan efektif, serta memberikan model evaluasi yang bisa diterapkan untuk menilai efektivitas kebijakan ini dalam lingkungan pendidikan yang beragam.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Agustini, S. (2024). *Wawancara, Wakasek bidang kesiswaan SMPN 14 Mataram.*
- Astrina, W. A. (2024). *Wawancara, Guru Mapel Agama Hindu SMPS Dwijendra Mataram.*
- Dian Ihsan. (2021). *Kumpulan Kasus Intoleransi di Sekolah.* Kompas.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/26/184625771/kumpulan-kasus-intoleransi-di-sekolah>
- Duhri, M. K. (2020, Januari 8). *Tak Berjilbab, Siswi SMAN 1 Gemolong Sragen Diintimidasi Pengurus Rohis.* Solopos.com. <https://soloraya.solopos.com/tak-berjilbab-siswi-sman-1-gemolong-sragen-diintimidasi-pengurus-rohis-1040549>
- Elvinaro, Q., & Syarif, D. (2022). Generasi Milenial dan Moderasi Beragama: Promosi Moderasi Beragama oleh Peace Generation di Media Sosial. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(2), 195–218. <https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.14411>
- Fathurrahman. (2024). *Wawancara, Guru Mapel Agama Islam Sekolah SMPN 14 Mataram.*
- Hanani, S., & Nelmaya, N. (2020). Penguatan Moderasi Beragama untuk Mengatasi Intoleransi di Kalangan Intelektual Kampus. *Kontekstualita*, 35(02), Article 02. <https://doi.org/10.30631/35.02.91-102>
- Harahap, S. W. (2024). Moderasi Beragama dalam Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 1(1), Article 1. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/740>
- Hj. Lina Yetti Budi Asih. (2024). *Wawancara Kepala Sekolah SMPN 14 Mataram.*
- Ikhwan, M., Azhar, Wahyudi, D., & Alfiyanto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>
- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244>
- Kadir, A. (2024a). *Wawancara, Guru BP SMPN 14 Mataram.*
- Kadir, A. (2024b). *Wawancara, Wakasek bidang kurikulum SMPN 14 Mataram.*
- Matius Alfons. (2019). *Imparsial: Ada 31 Kasus Intoleransi di Indonesia, Mayoritas Pelarangan Ibadah.* detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4787954/imparsial-ada-31-kasus-intoleransi-di-indonesia-mayoritas-pelarangan-ibadah>
- Melasari, F., Detasari, M., Sriwulan, F., Verliansyah, R., Santi, L., Ariko, R. S., & Reski, O. T. (2021). Bentuk Toleransi Antar Umat Beragama dalam Menjaga Identitas Nasional dan Bhineka Tunggal Ika. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31539/ijoce.v2i1.3104>
- Muryatini, N. W. Y. (2024). *Wawancara, Wakasek Bidang Kesiswaan SMPS Dwijendra.*
- NasuXon, F. H. (2019). *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia.* Bhuana ilmu populer.
- Pertana, P. R. (2019). *Viral, Ada SD Negeri di Gunungkidul Wajibkan Siswa Baru Berbaju Muslim.* detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4599034/viral-ada-sd-negeri-di-gunungkidul-wajibkan-siswa-baru-berbaju-muslim>

- Safitri, Y., Pane, A. E., & Harahap, E. W. (2023). Analisis Perilaku Politik, Budaya Masyarakat dan Agama di Indonesia. *Journal of Education Research*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.392>
- Shaleh, M., & Fadhillah, M. N. (2022). Penerapan Moderasi Beragama pada Lembaga PAUD di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2903>
- Tien, N. W. A. (2024). *Wakasek bidang Kurikulum SMPS Dwijendra Mataram*.
- Wardah, F. (2023, Februari 1). *Setara Institute: 50 Rumah Ibadah Diganggu Sepanjang 2022, Jawa Timur Paling Intoleran*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-50-rumah-ibadah-diganggu-sepanjang-2022-jawa-timur-paling-intoleran/6941621.html>
- Widiatuti, M. D. (2024). *Wawancara, Bidang Kesiswaan SMPS Dwijendra Mataram*.
- Wijanarka, T., & Sari, N. K. D. A. P. (2023). Pluralisme dalam Perwujudan Toleransi melalui Relasi Komunitas Gusdurian-Gereja Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW). *Dialog*, 46(2), Article 2. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.721>
- Yoga, I. B. A. (2024). *Wawancara, Kepala Sekolah SMPS Dwijendra Mataram*